

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI (SUATU STUDI KASUS)

Hastuti

Politeknik Negeri Bandung
hastuti@polban.ac.id

Dian Imanina Burhany

Politeknik Negeri Bandung
dianburhany@yahoo.com

Yanti Rufaedah

Politeknik Negeri Bandung
yanti.rufaedah@polban.ac.id

Muhammad Umar Mai

Politeknik Negeri Bandung
umar.mai@polban.ac.id

Hendi Rochendi

Politeknik Negeri Bandung
hendi.rohendi@polban.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate effectiveness of internal control system for single tuition fee (UKT) receivables at a state college in Bandung City, considering the low collectibility of accounts receivable and value of receivables always increases from year to year. This study uses quantitative descriptive method. Research data is subject data with primary sources collected through questionnaire. Variables were operationalized by referring to elements of COSO internal control system adopted in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning SPIP (Government Internal Control System) and adapted to research objectives. Data analysis was carried out on 5 sub variables and 14 dimensions of internal control which were collected from questionnaire. Research findings show that receivables internal control system is still ineffective with an effectiveness score of 0.3870. This is because 4 of 5 control components, namely control environment, risk assessment, control activities, and information and communication are still not effective. Meanwhile, one component of control, namely monitoring, is quite effective. Based on these results, the university concerned needs to improve implementation of internal control on components whose scores are still low so that internal control of accounts receivable becomes more effective and can increase collectibility of accounts and can improve the overall financial performance of organization.

Keywords: Effectiveness, Internal Control System, Single Tuition Fee Receivables

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem pengendalian intern piutang uang kuliah tunggal (UKT) di suatu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung, mengingat kolektibilitas piutang yang rendah dan nilai piutangnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian merupakan data subjek dengan sumber primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Variabel penelitian dioperasionalisasi dengan merujuk pada unsur sistem pengendalian intern COSO yang diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan terhadap 5 sub

variabel dan 14 dimensi pengendalian intern yang terkumpul dari kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern piutang masih kurang efektif dengan skor efektivitas 0,3870. Hal ini disebabkan karena 4 dari 5 komponen pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi masih kurang efektif. Sementara satu komponen pengendalian yaitu pemantauan sudah cukup efektif. Berdasarkan hasil ini, perguruan tinggi yang bersangkutan perlu meningkatkan implementasi pengendalian intern pada komponen yang skornya masih rendah sehingga pengendalian intern piutang menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan kolektibilitas piutang serta mampu meningkatkan kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Pengendalian Intern, Piutang Uang Kuliah Tunggal

I. PENDAHULUAN

Agar dapat mencapai tujuannya, organisasi harus dikelola dengan baik. Tata Kelola yang baik atau *good governance* yang menerapkan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja dan mencapai tujuannya. Namun, tata kelola tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh dua komponen lainnya yaitu manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain serta dipantau melalui aktivitas audit intern. Sistem pengendalian intern merupakan komponen pertama yang harus menjadi perhatian karena merupakan suatu mekanisme untuk mengendalikan organisasi dari dalam agar tidak terjadi penyimpangan/penyelewengan/kecurangan yang disengaja (*fraud*) maupun kesalahan dan kegagalan yang tidak disengaja, sehingga aset organisasi dapat diamankan dan peluang tercapainya tujuan organisasi meningkat (Reding *et al.*, 2013). Sudah seharusnya setiap organisasi memiliki sistem pengendalian intern yang efektif (Bayangkara, 2015).

Pada organisasi sektor publik, urgensi sistem pengendalian intern semakin tinggi karena akuntabilitas organisasi ditujukan kepada publik. Banyaknya fenomena *fraud* pada organisasi sektor publik dalam skala global maupun nasional menyebabkan tuntutan publik agar organisasi dikelola dengan baik semakin meningkat. Maka sistem pengendalian intern untuk mengatasi kegagalan, inefisiensi, dan *fraud* pada sektor publik harus ditingkatkan (Aziz *et al.*, 2015).

Rujukan sistem pengendalian intern yang banyak digunakan di seluruh dunia adalah COSO (Committee of Sponsoring Organizations), suatu organisasi swasta di Amerika yang mensponsori praktik sistem pengendalian intern. Konsep sistem pengendalian intern menurut COSO kemudian diadopsi untuk sektor publik (instansi pemerintah) di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diartikan sebagai "proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Proses ini dilakukan melalui 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Melalui SPIP, diharapkan pencapaian tujuan organisasi sektor publik menjadi lebih mudah.

Salah satu aset organisasi yang perlu dikelola dan dikendalikan dengan baik adalah piutang. Piutang merupakan aset yang penting karena di dalamnya tertanam kas organisasi. Likuiditas piutang adalah satu tingkat di bawah kas, namun jika tidak tertagih/tertunggak atau macet, akan mengganggu likuiditas dan arus kas yang dibutuhkan untuk operasional organisasi. Kolektibilitas piutang harus cukup tinggi agar perputarannya lancar sehingga dapat menambah kas organisasi

(Reeve *et al.*, 2014). Pada instansi pemerintah, piutang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perguruan tinggi negeri adalah salah satu bentuk instansi pemerintah dengan sumber utama PNBP dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Walaupun pemerintah sudah memberikan subsidi berupa beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak/kurang mampu dan sudah menerapkan uang kuliah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan individual keluarga setiap mahasiswa, masih ditemukan adanya tunggakan piutang UKT. Data pada sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Bandung menunjukkan jumlah piutang UKT yang cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama dalam 10 tahun terakhir (2008-2017). Khusus dari bulan Desember tahun 2016 ke bulan September tahun 2017 atau dalam waktu kurang dari satu tahun, jumlah piutang UKT meningkat sejumlah Rp335.295.750 atau sebesar 1,47%. Tingginya jumlah piutang ini menunjukkan rendahnya kolektibilitas piutang. Berdasarkan analisis umur piutang, umur piutang UKT ini juga sudah sangat lama yaitu 63,14% piutang termasuk kategori macet dan diragukan. Rinciannya adalah 36,48% piutang macet (belum dilunasi lebih dari 18 bulan sejak terutang/jatuh tempo) dan 26,66% piutang diragukan (belum dilunasi 12 sampai 18 bulan sejak terutang/jatuh tempo). Sisanya, 11,50% piutang kurang lancar (belum dilunasi 6 sampai 12 bulan sejak terutang/jatuh tempo) dan 25,36% piutang lancar (belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo) (Laporan Hasil Audit SPI, 2017).

Piutang UKT merupakan piutang terbesar dari suatu perguruan tinggi negeri karena perguruan tinggi adalah organisasi yang “menjual jasa pendidikan” kepada mahasiswa sebagai konsumen atau pelanggannya. Namun, seharusnya piutang ini tidak tersimpan terlalu lama sehingga jumlahnya semakin meningkat dan tidak terjadi penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Selain masalah likuiditas, kondisi ini juga menimbulkan masalah dalam hal penagihan karena mahasiswa yang sudah lulus tentu akan meninggalkan kampus dan tidak selalu dapat dihubungi. Hal ini akan menurunkan kinerja organisasi.

Ada indikasi, masalah ini timbul karena sistem pengendalian intern piutang pada perguruan tinggi negeri tersebut belum efektif. Jika sistem pengendalian intern piutang efektif maka dapat dipastikan bahwa piutang dicatat dengan benar, ditagih tepat waktu, risiko diantisipasi dengan tepat, *punishment* diberikan kepada debitur yang menunggak, sehingga kolektibilitasnya dapat ditingkatkan dan jumlah piutang dapat dikurangi sesuai masa jatuh temponya. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Putri dan Endiana, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern piutang pada perguruan tinggi tersebut agar dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya di masa yang akan datang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

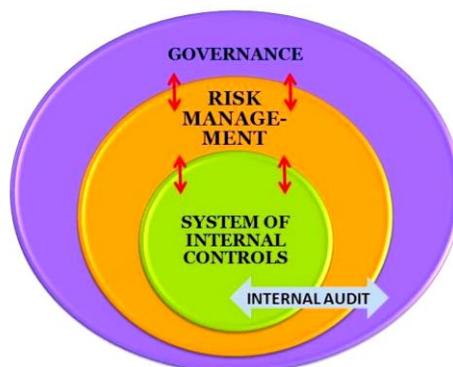
Sistem pengendalian intern adalah suatu konsep multidimensi dan telah dibahas dengan banyak cara dalam berbagai literatur pengendalian manajemen (Agbejule & Jokipii, 2009; Bowrin, 2004). Konsep ini bukan hanya tentang prosedur dan kebijakan yang dilakukan pada waktu tertentu, namun merupakan suatu sistem yang harus terus berjalan dan terintegrasi dengan sistem lain di semua tingkatan dalam suatu organisasi (Haron *et al.*, 2010).

Definisi paling populer dari pengendalian internal atau *internal control* dikemukakan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO), suatu inisiatif dari sektor swasta di Amerika yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utama komite ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu

definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Definisi pengendalian intern menurut COSO (2013) adalah: "Sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan". AICPA (2010) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai: "Proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku". Sedangkan menurut Sawyer *et al.* (2012), pengendalian intern adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, bentuk organisasi, kebijakan, sistem prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengadopsi definisi sistem pengendalian intern menurut COSO. Menurut PP ini, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Berdasarkan berbagai definisi di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, baik organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik, baik organisasi yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba.

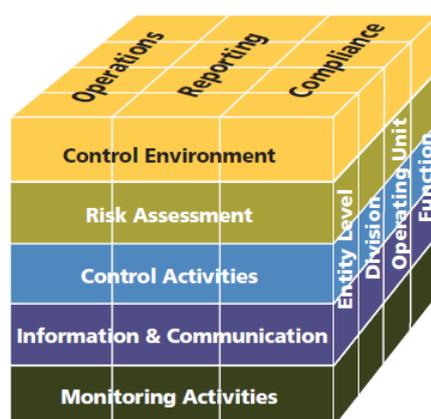
Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif bermanfaat dalam mencegah buruknya kondisi keuangan serta membantu organisasi untuk bekerja secara efektif sambil mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam operasinya (Pathak, 2005; Wardiwiyono, 2012). Organisasi sektor privat (perusahaan) telah mengakui pentingnya sistem pengendalian intern sebagai alat yang berguna dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Aziz, 2013). Sistem pengendalian intern juga memainkan peran penting dalam aktivitas audit intern karena merupakan hal yang pertama kali diperiksa oleh auditor dalam pekerjaan auditnya (Fadzil *et al.*, 2005). Sistem pengendalian intern merupakan salah satu komponen struktur tata kelola organisasi, yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Bowrin, 2004). Sistem pengendalian intern memiliki hubungan dengan manajemen risiko dan tata kelola dalam suatu sistem tata kelola organisasi. Dia merupakan bagian terdalam dan yang pertama-tama harus diperiksa oleh audit intern dalam rangka mencapai misinya untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, setelah itu barulah manajemen risiko dan kemudian tata kelola (Reding *et al.*, 2013).



Gambar 1
Hubungan Antara Tata Kelola, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern dan Audit Internal
Sumber: Reding et al. (2013)

Pada organisasi sektor publik, sistem pengendalian intern berperan dalam mendukung akuntabilitas yang merupakan hal yang sangat penting karena adanya tanggung jawab organisasi kepada publik (Bianchi, 2010). Ini disebabkan karena publik menaruh harapan yang besar kepada organisasi sektor publik agar mengutamakan kepentingan publik dalam aktivitasnya. Terciptanya akuntabilitas dalam organisasi sektor publik tersebut sangat bergantung pada sistem pengendalian intern (Liu, 2011). Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang efektif sangat penting pada organisasi sektor publik.

Model COSO yang digambarkan dalam suatu kubus yang dinamakan Kubus COSO (The COSO Cube) merupakan model sistem pengendalian intern yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengendalian intern.



Gambar 2
The COSO Cube
Sumber: COSO (2013)

Pada bagian atas kubus ini, tercantum tiga tujuan utama sistem pengendalian intern:

1. *Operations*, yaitu operasi yang efektif (tujuan tercapai) dan efisien
2. *Reporting*, yaitu laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. *Compliance*, yaitu kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan

Pada bagian samping tercantum level organisasi di mana sistem pengendalian intern diterapkan. Sistem pengendalian intern harus diterapkan pada semua level organisasi yaitu level entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi. Pada bagian depan kubus, tercantum komponen atau elemen sistem pengendalian intern. Menurut COSO (2013), sistem pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kelima komponen tersebut

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
Meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan terhadap pengendalian secara khusus. Komponen ini merupakan dasar atau fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya.
2. *Risk Assessment* (Penentuan risiko)
Meliputi identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan (misalnya: operasional, keuangan, kepatuhan), dampak dan kemungkinan terjadinya, serta prioritasnya. Penentuan risiko merupakan suatu proses yang terus berjalan.
3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)
Meliputi kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan serta tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko.
4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
Sistem informasi menghasilkan laporan yang memuat informasi operasional, keuangan dan kepatuhan, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Informasi tersebut harus mengalir/dikomunikasikan ke seluruh organisasi, pada waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat.
5. *Monitoring Activities* (Aktivitas Pemantauan)
Meliputi proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern melalui aktivitas pengawasan dan evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh manajemen atau oleh auditor intern dan ekstern.

Adapun prinsip pengendalian menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sejalan dengan COSO juga terdiri atas 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap unsur terdiri atas sub unsur/dimensi berikut ini:

- A. Lingkungan Pengendalian, mencakup:
 1. Penegakan integritas dan nilai etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Kepemimpinan yang kondusif
 4. Struktur organisasi
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
 6. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia
 7. Peran aparat pengawasan intern pemerintah
- B. Penilaian Risiko, mencakup aktivitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengatasi, mengurangi, dan/atau menghilangkan risiko.
- C. Kegiatan Pengendalian, mencakup:
 1. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab
 2. Otorisasi
 3. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)
- D. Informasi dan Komunikasi, mencakup:
 1. Informasi
 2. Komunikasi

- E. Pemantauan, mencakup pemantauan oleh pimpinan unit terkait kepada pegawainya, oleh Satuan Pengawas Intern sebagai APIP, tindak lanjut atas hasil pengawasan, dan mekanisme umpan balik.

Piutang dan Sistem Pengendalian Intern Piutang

Piutang (*receivable*) didefinisikan sebagai: "Seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang merupakan bagian yang signifikan dari aset lancar. Piutang timbul sebagai akibat dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa, pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atau saham dan surat berharga lain yang akan diterbitkan, klaim atas ganti rugi dari perusahaan asuransi dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain" (Reeve *et al.*, 2014). Pada keuangan negara, piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah (PMK nomor 69 tahun 2014). Pada institusi pendidikan, piutang timbul dari penjualan jasa pendidikan. Jika institusi pendidikan merupakan perguruan tinggi negeri maka piutang disebut piutang UKT (uang kuliah tunggal). Besarnya piutang UKT akan menyebabkan penerimaan PNBPN tertahan pada aset lancar.

Pengelolaan piutang pada entitas pemerintahan terbagi menurut level dan wewenangnya. Piutang PNBPN dapat dikelola oleh kementerian/lembaga. Piutang PNBPN pada perguruan tinggi negeri meliputi piutang PNBPN umum dan PNBPN fungsional sesuai dengan karakteristik organisasinya. Kualitas piutang negara diklasifikasikan ke dalam (a) kualitas lancar apabila piutang belum jatuh tempo; (b) kualitas kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo; (c) kualitas diragukan apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo; (d) kualitas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo (PMK nomor 69 tahun 2014).

Pada prinsipnya, sistem pengendalian intern harus dapat meminimalisir dan mendeteksi risiko serta memperbaiki kesalahan/masalah. Penerapan sistem pengendalian intern piutang harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi piutang telah dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan serta risiko tidak tertagihnya piutang dapat diminimalisir sehingga kolektibilitas piutang dapat ditingkatkan dan kinerja keuangan organisasi juga meningkat. Peran satuan pengawasan intern (SPI) sebagai auditor intern pun dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Tim audit intern yang lebih besar dapat meningkatkan kinerja audit intern untuk operasional dan kepatuhan, sedangkan kompetensi auditor intern secara positif terkait dengan efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan, tetapi tidak untuk operasional (Chang *et al.*, 2018). Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Putri dan Endiana, 2020) dan pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan organisasi (Lestari dan Dewi, 2020). Pada instansi pemerintah, sistem pengendalian intern yang efektif dapat mempengaruhi efektivitas auditor intern di pemerintah daerah (Badara & Saidin, 2013).

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah sistem pengendalian intern piutang (piutang PNBPN berupa piutang UKT) pada satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada satu perguruan tinggi negeri vokasi di

Kota Bandung. Populasi penelitian adalah semua karyawan di perguruan tinggi tersebut, kemudian dengan teknik *purposive sampling* ditetapkan 16 responden yang langsung berkaitan dengan pengelolaan piutang UKT. Teknik *purposive sampling* digunakan jika sampel hanya terbatas pada unit tertentu yang dapat memberikan informasi dengan kriteria yang sudah ditentukan (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel pada penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang dioperasionalkan dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengadopsi prinsip pengendalian intern pada COSO. Sub variabel adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima sub variabel tersebut dikembangkan sehingga menjadi 14 dimensi (PP No. 60 tahun 2008). Jenis data adalah data subjek dengan sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup yang dikembangkan dengan merujuk pada *internal control questionnaire* (Arens, 2016) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Ada 3 pilihan jawaban yang disediakan yaitu “Ya”, “Tidak”, dan “Tidak Tahu”. Jika jawaban kuesioner adalah “Ya” diberikan skor 1, jika “Tidak” dan “Tidak Tahu” diberikan skor 0.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberi skor pada jawaban responden di kuesioner
2. Menghitung skor pada setiap dimensi, sub variabel, dan variabel.
3. Menghitung nilai (indeks) pada setiap dimensi, sub variabel, dan variabel yaitu dengan membandingkan skor aktual dengan skor ideal (skor jika semua jawaban adalah “Ya” yang bernilai 1).
4. Menyimpulkan nilai efektivitas sistem pengendalian intern piutang berdasarkan kategori pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Persentase dan Kategori Penilaian Efektivitas

Nilai	Kategori
0% - 25%	Tidak Efektif
25,01% - 50%	Kurang Efektif
50,01% - 75%	Cukup Efektif
75,01% - 100%	Efektif

Sumber: Sugiyono (2017)

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data dari jawaban responden terhadap kuesioner pengendalian intern sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern piutang UKT menunjukkan skor dimensi, sub variabel, dan variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Skor Efektivitas Pengendalian Intern Piutang UKT

No.	Sub variabel / Dimensi	Skor
	Sub Variabel A: Lingkungan Pengendalian	0,3185
1.	Dimensi 1: Penegakan integritas dan nilai etika	0,2500
2.	Dimensi 2: Komitmen terhadap kompetensi	0,3125

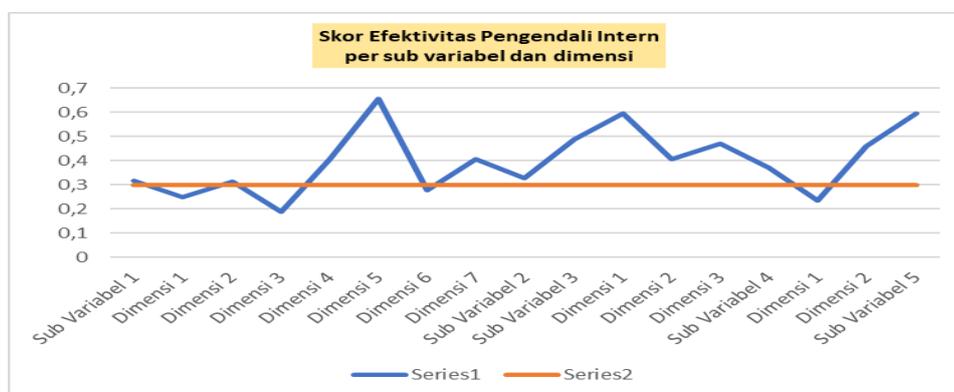
3.	Dimensi 3: Kepemimpinan yang kondusif	0,1875
4.	Dimensi 4: Struktur organisasi	0,4063
5.	Dimensi 5: Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	0,6563
6.	Dimensi 6: Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia	0,2768
7.	Dimensi 7: Peran aparat pengawasan intern pemerintah	0,4063
8	Sub Variabel B: Penilaian Risiko	0,3281
	Sub Variabel C: Kegiatan Pengendalian	0,4896
9.	Dimensi 1: Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab	0,5938
10.	Dimensi 2: Otorisasi	0,4063
11.	Dimensi 3: Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)	0,4688
	Sub Variabel D: Informasi dan Komunikasi	0,3688
12.	Dimensi 1: Informasi	0,2344
13.	Dimensi 2: Komunikasi	0,4583
14.	Sub Variabel E: Pemantauan	0,5938
	Skor Variabel	0,3870

Sumber: Data penelitian, diolah (2020)

Tabel 2 di atas menunjukkan skor variabel secara keseluruhan untuk kelima unsur/sub variabel sistem pengendalian intern piutang adalah sebesar 0,3870. Dengan kata lain, efektivitasnya baru berada pada kisaran 38,70% atau termasuk ke dalam kategori kurang efektif berdasarkan kategori pada Tabel 1. Sistem pengendalian intern yang kurang efektif berarti aspek-aspek pengendalian atas pengelolaan piutang UKT masih memiliki kelemahan atau defisiensi (*deficiency*). Kelemahan tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Tidak adanya sistem/prosedur/kebijakan/aturan yang dibuat atau dirancang untuk menutup berbagai celah timbulnya kecurangan (*fraud*) atau penyalahgunaan aset (*misappropriate of asset*);
2. Tidak diterapkannya sistem/prosedur/kebijakan/aturan yang dibuat atau dirancang untuk menutup berbagai celah timbulnya kecurangan (*fraud*) atau penyalahgunaan aset (*misappropriate of asset*) tersebut.

Jika skor efektivitas sistem pengendalian intern piutang PNBPN tersebut disajikan dalam bentuk grafik, akan tampak sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2
Grafik Skor Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang PNBPN
 Sumber: Data penelitian, diolah (2020)

Terlihat pada Gambar 2 bahwa skor variabel efektivitas sistem pengendalian intern piutang PNB (garis berwarna jingga) berada di antara 0,3 dan 0,4, atau tepatnya adalah 0,3870 yang relatif rendah sehingga menandakan kurang efektifnya sistem pengendalian intern piutang. Adapun skor sub variabel dan dimensi (garis berwarna biru) terlihat sangat bervariasi. Posisi yang paling tinggi hingga hampir mencapai 0,7 (0,6563 berdasarkan Tabel 2) adalah untuk dimensi 5 yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada sub variabel 1 lingkungan pengendalian. Posisi yang paling rendah dan berada di bawah posisi variabel secara keseluruhan adalah untuk dimensi 3 yaitu kepemimpinan yang kondusif, juga pada sub variabel 1 lingkungan pengendalian, dengan skor 0,1875.

Kontribusi rendahnya efektivitas sistem pengendalian intern piutang PNB berasal dari empat sub variabel yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi, yang keempatnya berada pada kategori kurang efektif. Hanya ada satu sub variabel yang berada pada kategori cukup efektif yaitu Pemantauan. Berikut ini uraian per sub variabel berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 dan merujuk pada pengkategorian Tabel 1:

1. Lingkungan Pengendalian

Sub variabel ini merupakan dasar/fondasi yang memayungi semua kegiatan pengendalian intern pada organisasi/perusahaan (COSO, 2013). Jika sub variabel ini baik maka akan melandasi efektivitas pengendalian pada sub variabel lainnya. Skor sub variabel ini adalah 0,3185 yang berarti kurang efektif, karena hanya 31,85% saja pengendalian pada sub variabel ini dirasakan efektivitasnya. Rendahnya skor sub variabel ini dihasilkan dari skor 7 dimensi yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika, skor 0,2500 atau 25% yang berarti tidak efektif
- b. Komitmen terhadap kompetensi, skor 0,3125 atau 31,25% yang berarti kurang efektif
- c. Kepemimpinan yang kondusif, skor 0,1875 atau 18,75% yang berarti tidak efektif
- d. Struktur organisasi, skor 0,4063 atau 40,63% yang berarti kurang efektif
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, skor 0,6563 yang berarti cukup efektif
- f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia, skor 0,2768 yang berarti kurang efektif
- g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah, skor 0,4063 yang berarti kurang efektif.

Terlihat bahwa semua dimensi berada pada kategori kurang efektif kecuali satu dimensi yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berada pada kategori cukup efektif. Ini berarti sudah terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan piutang, namun unsur lingkungan pengendalian lainnya belum diimplementasikan dengan baik terutama dalam hal kepemimpinan yang kondusif dengan skor terendah yaitu 0,1875.

2. Penilaian Risiko

Sub variabel ini memiliki skor sebesar 0,3281 atau 32,81% yang berarti kurang efektif. Ini menandakan belum dilakukannya aktivitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengatasi, mengurangi, dan/atau menghilangkan risiko atas piutang PNB secara optimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Sub variabel ini memperoleh skor 0,4896 atau 48,96% yang masuk ke dalam kategori kurang efektif. Skor sub variabel ini dihasilkan dari skor 3 dimensi yaitu:

- a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab, skor 0,5938 atau 59,38% yang berarti cukup efektif
- b. Otorisasi, skor 0,4063 atau 40,63% yang berarti kurang efektif
- c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan) 0,4688 atau 46,88% yang berarti kurang efektif.

Terdapat satu dimensi yang cukup efektif yaitu dimensi pertama. Dimensi ini menjelaskan

bahwa telah terdapat pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pegawai atau bagian yang mengotorisasi, bagian yang mencatat transaksi dan bagian yang berkomunikasi dengan pelanggan (mahasiswa) untuk menagih dan menerima pelunasan piutang. Namun dua dimensi lainnya masih kurang efektif sehingga skor keseluruhan sub variabel ini adalah kurang efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Skor sub variabel ini adalah 0,3688 atau 36,88% yang berarti kurang efektif. Dapat dikatakan bahwa aliran informasi dan komunikasi terkait piutang PNBP tidak berjalan dengan lancar. Rincian skor dimensi pada sub variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Informasi, skor 0,2344 atau 23,44% yang berarti tidak efektif
- b. Komunikasi, skor 0,4583 atau 45,83% yang berarti kurang efektif

5. Pemantauan

Sub variabel ini memiliki skor 0,5938 atau 59,38% yang berarti cukup efektif. Ini merupakan sub variabel dengan skor yang tertinggi yang menandakan bahwa telah dilakukan pemantauan secara cukup oleh pimpinan unit terkait kepada pegawainya dan oleh Satuan Pengawas Intern sebagai APIP. Selain itu, tindak lanjut atas hasil pengawasan dan mekanisme umpan balik juga telah cukup dilakukan.

Untuk menghindari kecurangan, penipuan, dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh karyawan, sistem pengendalian intern harus berjalan secara efektif (Lestari & Dewi, 2020). Kelima unsur atau sub variabel pada sistem pengendalian intern membantu pimpinan untuk mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan organisasi. Pada organisasi sektor publik, sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian intern pada pengelolaan piutang UKT adalah kurang efektif. Inilah yang menjelaskan fenomena mengapa kolektibilitas piutang UKT tersebut rendah dan jumlah piutang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengelolaan piutang yang baik dan ditunjang oleh penerapan sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan kinerja bagian kolektibilitas piutang. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Endiana (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Pada akhirnya, penerapan sistem pengendalian intern juga akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan organisasi (Lestari dan Dewi, 2020). Hal menarik dari hasil penelitian ini adalah unsur pemantauan yang cukup efektif walaupun lingkungan pengendalian sebagai unsur yang merupakan fondasi dari sistem pengendalian intern masih kurang efektif. Ini menandakan fungsi pengawasan yang berjalan baik.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya kolektibilitas dan kecenderungan meningkatnya saldo akun piutang PNBP khususnya piutang UKT pada laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perguruan tinggi negeri yang menjadi subjek penelitian. Ada indikasi hal ini terkait dengan sistem pengendalian intern sehingga dilakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern piutang. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian intern piutang masih kurang efektif. Ini disebabkan karena empat unsur sistem pengendalian intern yang menjadi sub variabel dalam penelitian ini yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi, masih

kurang efektif. Hanya satu unsur atau sub variabel yang cukup efektif yaitu Pemantauan. Dengan demikian fenomena tersebut dapat dijelaskan oleh hasil penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan implementasi unsur sistem pengendalian intern piutangnya terutama pada unsur yang masih kurang efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Perbaikan harus dimulai dari unsur lingkungan pengendalian karena merupakan fondasi bagi empat unsur yang lainnya. Unsur pemantauan yang sudah cukup efektif pun masih perlu ditingkatkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agbejule, A., & Jokipii, A. (2009). Strategy, control activities, monitoring and effectiveness. *Managerial Auditing Journal*, 24(6): 500–522. <https://doi.org/10.1108/02686900910966503>
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (2010). *Codification of statements on auditing standards*. New York: AICPA.
- Arens, J. (2016). *Modern Auditing*. John Wiley and Sons Inc.
- Aziz, N.A.A. (2013). Managing corporate risk and achieving internal control through statutory compliance. *Journal of Financial Crime*, 20(1): 25-38. <https://doi.org/10.1108/13590791311287328>
- Aziz, M.A.A., Rahman, H.A., Alam, M.M., and Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28: 163-169.
- Badara, M.S., & Saidin, S.Z. (2013). Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(1): 16-23. <https://doi.org/10.22610/jsds.v4i1.731>
- Bayangkara, IBK. (2015). *Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bianchi, C. (2010). Improving performance and fostering accountability in the public sector through system dynamics modelling: From an “external” to an “internal” perspective. *Systems Research and Behavioral Science*, 27: 361-384. <https://doi.org/10.1002/sres.1038>
- Bowrin, A. R. (2004). Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(1): 121-152. <https://doi.org/10.1108/09513570410525238>
- Chang, Y.T., Chen, H., Cheng, R.K., & Chi, W. (2018). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 5(1): 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.11.002>
- Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control Integrated Frame Work*. New York: AICPA.
- Fadzil, F. H., Haron, H., Jantan, M. (2005). Internal auditing practices and internal control system. *Managerial Auditing Journal*, 20(8): 844-866.
- Haron, H., Ibrahim, D. D. N., Jeyaraman, K., Chye, O. H. (2010). Determinants of internal control characteristics influencing voluntary and mandatory disclosures: A Malaysian perspective. *Managerial Auditing Journal*, 25(2): 140-159. <https://doi.org/10.1108/02686901011008954>
- Lestari, N.L.W.T., & Dewi, N.N.S.R.T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(20): 170-178.

<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>

- Liu, O. (2011). Outcomes assessment in higher education: Challenges and future research in the context of voluntary system of accountability. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 30: 2-9. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2011.00206.x>
- Pathak, J. (2005). Risk management, internal controls and organizational vulnerabilities. *Managerial Auditing Journal*, 20(6): 569-577. <https://doi.org/10.1108/02686900510606065>
- Putri, P.A.Y. & Endiana, I.D.M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Koperasi di Kecamatan Payangan. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2): 179-189. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189>
- Reding, K.F., Sobel, P.J., Anderson, U.L., Head, M.J., Ramamoorti, S., Salamasik, M., and Riddle, C. (2013). *Internal Auditing: Assurance and Consulting Services*. Third Edition. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Reeve, J.M., Warren, C.S., Duchac, J.E., Wahyuni, E.T., Soepriyanto, G., Jusuf, A.A., & Djakman, C.D. (2014). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., and Scheiner J.H. (2012). *Sawyer's Internal Auditing*. Edisi Kelima. Terjemahan Oleh: Desi Adhariani. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business*. 6th edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardiwiyono, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4): 340-352.

Dokumen

- Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Politeknik Negeri Bandung Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kualitas Piutang Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.